

## DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Dominggus Elcid Li dan Paul SinlaEloE, Perdagangan Orang dan Memblenya Kepolisian, Atikel yang dipublikasikan dalam Harian Umum Victory News, tanggal 25 Februari 2014

R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006.

R. Soesilo, RIB/HIR Dengan Penjelasan, Penerbit Politeia, Bogor, 1995

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Pres. 2008.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada. 2006.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Peraturan PerUndang-Undangan :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008, Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Sumber Lainnya :

<https://buruhmigran.or.id/2014/10/28/mekanisme-penanganan-kasus-tppo-di-kepolisian/> diakses pada tanggal 07 Oktober 2016 pada pukul 02.11 WIB  
<https://buruhmigran.or.id/2015/08/26/press-release-indonesia-darurat-trafficking-tuntaskan-kasus-tki-abk/> diakses pada tanggal 07 Oktober 2016 pada pukul 02.18 WIB

<http://news.liputan6.com/read/2249883/catatan-iom-human-trafficking-paling-banyak-terjadi-di-indonesia> diakses pada tanggal 07 Oktober 2016 pada pukul 02.30 WIB

<http://belajarpikologi.com/pendekatan-jenis-dan-metode-penelitian-pendidikan/diakses> pada tanggal 07 Oktober 2016 pada pukul 02.48 WIB